

Dialog yang Represif: Studi Kasus terhadap Dialog MUI dan JAI di Kuningan

Flavius Floris Andries

Prof. Dr. Mohtar Maso'ed (Promotor)

Dr. ZainalAbidin Bagir (Ko-promotor)

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Diterima melalui Pos, 14 Maret 2013

Abstract

A dialogue among religions is the basic need in the multicultural life of Indonesia. Without any interfaith dialogue, conflicts and violence in the name of religion are difficult to be avoided. However, the process of dialogue is not an easy task to do. There is a basic need to find the proper methods of dialogue, because a mistake in finding the methods will complicate the process of dialogue, the dialogue can be meaningless and failed. This research demonstrates the failure of a dialogue because of a mistake in finding methods of dialogue, which prevents the dialogue reaching its ends. Based on a case study, this research analyses the aspects that can lead to the failure of a dialogue between Islam (MUI) and JAI in Kuningan. This research is important because the conflicts and violence occurred on the basis of different ideologies between Islam and JAI have not met any solutions despite the engagement of both parties in some dialogues. This research found that the failure in the dialogue between Islam (MUI) and JAI in Kuningan was because of the repressive factors of Islamic groups represented by MUI and the attitude of the government as biased mediator.

Keywords: JAI; MUI; Government; Repressive Dialogue

Abstrak

Dialog antar agama, adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan multikultural seperti dalam konteks Indonesia. Tanpa adanya dialog antar agama, persoalan-persoalan konflik dan kekerasan yang berbasis agama akan sulit dihindari. Namun proses dialog bukanlah hal yang gampang dan mudah untuk dilakukan. Kebutuhan mencari metode berdialog yang tepat adalah kebutuhan mendasar, karena kesalahan dalam memilih metode akan mempersulit proses dialog, bahkan dialog akan menjadi tidak berarti atau gagal karena kesalahan dalam memilih metode. Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana gagalnya sebuah dialog akibat kesalahan dalam memilih metode dialog, sehingga proses dialog tidak sampai pada tujuan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus penelitian ini mencoba mengangkat persoalan gagalnya sebuah dialog antara Islam dan JAI di Kuningan. Penelitian ini sangat penting karena mengingat konflik bahkan kekerasan yang muncul akibat adanya perbedaan ideology antara Islam dan JAI telah menempuh upaya dialog untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun upaya tersebut gagal. Berdasarkan hasil riset ditemukan bahwa kegagalan dialog antara Islam dan JAI di Kuningan disebabkan oleh faktor represifitas kelompok Islam yang diwakili oleh MUI serta adanya sikap pemerintah sebagai mediator yang tidak netral.

Kata kunci: JAI, MUI, pemerintah, Dialog represif.

Pendahuluan

Konflik yang mengarah pada tindak kekerasan atas nama agama sebagai penyebab, menjadi fenomena di berbagai tempat. Konflik Israel dan Palestina, Islam dan Kristen di Afrika, konflik di Yaman, Zuriyah dan diberbagai belahan bumi adalah representasi dari fenomena social keagamaan secara global yang dapat dilihat melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Walaupun sebagian besar kekerasan tersebut disebabkan oleh faktor politik (kekuasaan), ekonomi (kesejahteraan), namun kecenderungan masyarakat memahaminya dari sisi agama. Secara faktual hal ini bias dilihat dari konflik Israel-Palestina, dimana menimbulkan banyak protes, secara khusus dari dunia Islam maupun Indonesia yang melakukan protes tidak saja karena persoalan kemanusiaan, tetapi karena solidaritas keagamaan, sehingga melihat kasus tersebut sebagai konflik Islam dan Israel. Hal ini berbeda dengan respons masyarakat Islam terkait dengan krisis di Zuriyah, maupun Yaman, seakan-akan kurang mendapat perhatian masyarakat maupun media seperti konflik kekerasan yang terjadi antara Israel-Palestina.

Di Tingkat lokal, konflik yang mengarah pada tindakan kekerasan atas nama agama juga menjadi fenomena social dalam konteks Indonesia. Konflik, Maluku, Poso, Sejumlah konflik kekerasan antara Islam dan JAI, di Jawa Barat, Mataram, bahkan antara Islam dan Syiah di Madura, adalah fakta sosial bahwa yang menggambarkan bahwa betapa besar sisi keburukan dan fanatisme keagamaan yang mendominasi cara beragama masyarakat Indonesia. Sensitifitas keagamaan masih menjadi problem penting, bahkan menjadi potensi konflik yang besar karena sifat fanatisme keagamaan yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya agama itu bersifat ambigu (Baum).

Agama sebagai produksi manusia dengan nilai-nilai religiusitas memiliki implikasi baik maupun buruk (Berger, 1967:180). Dimana implikasi baik dan buruk sangat tergantung dari apa yang objek perhatian dari subjek yang mengonstruksinya.

Secara khusus konflik Islam dan JAI yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di berbagai tempat, misalnya Jawa Barat: Cikeusik, Parung, Tasik Malaya, Kuningan, Maupun di Mataram, (NTB) adalah fakta keberagaman yang muncul akibat adanya perbedaan konstruksi nilai religious yang berbeda satu dengan lainnya. Konflik ini mungkin tidak akan terselesaikan namun setidaknya upaya meminimalisir terjadinya aksi kekerasan dan anarkisme yang brutal atas nama agama perlu dilakukan melalui dialog. Dialog masih dianggap relevan dan potensial dalam penyelesaian konflik antar agama termasuk internal agama seperti yang terjadi antara Islam mainstream dan JAI. Secara khusus terkait dengan kasus di Kuningan, terjadi upaya damai melalui dialog yang diprakarsai oleh pemerintah baik, DPRD maupun Bupati namun semuanya tidak memberikan solusi penyelesaian masalah, bahkan dialog tersebut lebih menunjukan adanya dominasi dan keberpihakan dari pemerintah terhadap kelompok tertentu sehingga dialog dinilai gagal. Oleh sebab itu menjadi fokus pembahasan dalam riset ini adalah bagaimana proses dialog Islam *mainstream* yang diwakili oleh MUI dan JAI di Kuningan dalam meminimalisir konflik. Persoalan ini akan dijabarkan melalui dua pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah (DPRD dan BUPATI) sebagai media sosial dalam upaya dialog Islam (MUI) dan JAI.
2. Bagaimana posisi MUI dan JAI dalam dialog tersebut, dan apa dampak bagi situasi masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang didapatkan melalui hasil interview terhadap para informan yakni dari komunitas JAI, Kelompok organisasi Islam seperti MUI, NU dan Muhammadiyah, serta pemerintah setempat. Interview terhadap para informan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya dialog sebagai alternative penyelesaian konflik JAI dan kelompok Islam di Kuningan, serta mengetahui posisi masing-masing kelompok dalam hal ini JAI dan MUI yang merepresentasi kelompok Islam di Kuningan dalam proses dialog. Data yang ditemukan akan dideskripsikan melalui proses interpretasi dan kemudian dilakukan analisis kritis (*critical analyzing*).

Kerangka Teori

Konteks bermasyarakat, maupun beragama dimana pun berada tidak terlepas dari yang namanya dialog, apalagi dalam suatu masyarakat plural dan multikultur, dialog menjadi hal penting dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik yang bisa mengarah pada aksi kekerasan. Namun seringkali dialog disalah artikan dimana dialog lebih mengarah pada relasi dialetika yang mengarah pada diskusi, debat untuk mencair kesalahan, kekurangan dan kelemahan setiap partisipan. Dalam konteks keagamaan, klaim kemutlakan suatu kebenaran (*absolute truth*), seringkali menggiring perjalanan keberagaman suatu masyarakat beragama tiba pada konflik yang mengarah pada tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Pada sisi munculnya cara pandang yang eksklusif menyebabkan terjadinya sikap antipati dari suatu kelompok agama kepada kelompok lainnya, maupun varian keagamaan yang satu dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa dialog

belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat termasuk komunitas beragama.

Kniter, seorang pluralis, menyatakan bahwa dialog bukan toleransi, saling tukar informasi, dan proses sinkretisme. Dialog adalah sebuah percakapan yang melibatkan semua partisipan dalam percakapan yang mencoba mengajak semua orang untuk belajar tentang satu sama lain agar dapat mengenal dengan baik tentang yang lain dari masing-masing. Menurut Kniter dialog dapat berlangsung apabila dimulai dari hal-hal yang bersifat praksis, yang dialami oleh semua agama yakni, *common ground* dan bukan dari apa yang diyakini (Kniter, 1995: 54). Hal lain yang ditawarkan Kniter dalam proses dialog adalah bagaimana cara atau bentuk-bentuk dialog yang bisa digunakan saat orang melakukan dialog yakni *replacement Model* (eksklusif) yang klaim kebenaran terhadap satu agama saja, *The Fulfillment model* (inklusif) adanya pengakuan kebenaran dan keselamatan dalam agama lain, *the mutuality Model* (pluralis) adanya pengakuan terhadap kelangsungan hidup diberbagai jalan yaitu *the acceptance model* liberalis yakni adanya pengakuan terhadap keberlangsungan dari kebenaran pada masing-masing agama dengan tetap didasarkan pada keyakinan dalam kebenaran yang dianut.

Di sisi lain Kniter juga mengajak kita untuk memahami dialog yang harus menjangkau persoalan global terkait dengan penderitaan (kemiskinan, peperangan, kebijakan global, dan lain-lain). Kniter menawarkan suatu cara bagi semua agama untuk bagaimanapun upaya menghadapi penderitaan, dan pertanggung jawaban global yang harus dilaksanakan berdasarkan *common ground* dan *common cause* (Kniter, 2002). Kniter menegaskan bahwa dialog keagamaan tidak terbatas pada pengertian percakapan antar agama yang siftnya memebri

informasi menyangkut persamaan maupun perbedaan masing-masing agama. Namun dialog adalah suatu hubungan mutualisme yang dibangun berdasarkan suatu harapan bagi semua orang untuk menumbuhkan kembangkan pengetahuan dan praktek tentang konsep apa itu kebenaran dan kebaikan.

Pandangan Knitter menunjukkan suatu bukti sejarah dialektika agama, yang membawa pengaruh kepada pola-pola dialog antar agama yang telah berkembang dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan, dialog kehidupan, perbuatan, kerukunan, sharing pengalaman beragama, dialog kerja sosial dialog aksi, dialog terbuka, *interfaith dialogue* dan lain-lain (Burhanudin Daya, 2004:39). Samartha (1989: 77) mendefinisikan dialog dalam konteks partikularis sebagai upaya memahami dan menyatakan sifat kekhususan ada suatu kelompok masyarakat beragama. Hal ini bukan saja dalam kaitan dengan warisannya saja, tetapi **dalam hubungan dengan warisan rohani tetangga-tetangga. Senada dengan padangan Samartha, Panikar menguraikan bahwa** yang terdapat dalam dialog hubungan antar agama bukan hubungan asimilasi atau substitusi, melainkan hubungan yang saling menyuburkan. Tujuan dialog menurutnya adalah menekankan kesinambungan suatu kedalaman maka yang dapat ditemukan diantara agama-agama dan komunitasnya (Panikar, 1999:77).

Hans Kung mengatakan bahwa tanggung jawab global adalah dasar bagi semua agama. Kung menegaskan bahwa semua agama di dunia ini sesungguhnya berkontribusi bagi para pengambil kebijakan di segala bidang untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di dunia. *There can be no peace among nations unless there is peace among religions* (Kung, 1991: xv). Dari pernyataan Kung yang mengatakan bahwa tidak ada perdamaian

antar bangsa jika tidak ada perdamaian antar agama. Kung memahami agama sebagai sumber konflik yang potensial, perdamaian antar bangsa sangat ditentukan dari perdamaian antar agama.

Kesadaran akan bahaya yang bisa dimunculkan oleh ketiadaan perdamaian antar agama, maka Swidler (1987) mengatakan dialog itu sangat penting agar semua orang bisa belajar yang bisa merubah persepsi dan pemahaman setiap orang akan realitas dan bagaimana kita harus berbuat. Oleh sebab itu dialog antar agama maupun ideology harus dilihat dari dua sisi yakni sejauhmana keduanya saling mendalami komunitas masing-masing. Dalam dialog setiap orang dituntut memiliki nilai kejujuran dan ketulusan, dan selalu berupaya menghindari sikap membandingkan gagasan si pelaku dalam dialog dengan persoalan keyakinan. Setiap partisipan dialog harus mendefinisikan atau menegaskan doktrin agama masing-masing sesuai keyakinan yang dianut, serta menghindari pandangan yang radikal, yang cepat menyimpulkan ketidaksetujuan pandangan. Dialog dapat berjalan apabila terdapat kesejajaran pandangan, serta akan mendapat tempat apabila didasari oleh adanya konsep kebenaran bersama. Setiap partisipan dalam dialog harus memiliki sikap kritis terhadap cara pandang dirinya sendiri dan tradisi yang dianutnya. Selanjutnya setiap partisipan berusaha masuk kepengalaman yang dimiliki oleh partnernya dalam dialog agama/ideology dan mencoba mendalaminya.

Dari penjelasan beberapa ahli yang disebutkan di atas, maka dipandang penting bahwa yang menjadi penekanan dalam berdialog adalah dialog kehidupan, dimana diskursus kehidupan keagamaan yang perlu ditekankan dewasa ini melampaui batas-batas wacana teologis, dogmatis, yang seringkali menjadi sumber konflik, tetapi bagaimana dari

setiap ideology dan teologi dari masing-masing agama dikembangkan menjadi suatu paradigma berpikir kritis analitis untuk berkontribusi bagi persoalan humanitas, menjawab tantangan global, dari berbagai krisis, baik lingkungan, keadilan dan lain-lain.

Peranan Pemerintah Sebagai Media Sosial dalam Upaya Membangun Dialog Islam dan JAI

Relasi Islam (MUI) dan JAI di Kuningan berada dalam situasi yang tidak harmoni. Hal ini disebabkan adanya perbedaan doktrin teologi antara kedua kelompok tersebut yang masing-masing mengklaim diri sebagai Islam mengikuti Nabi Muhammad saw, namun memiliki interpretasi ajaran bahkan doktrin yang berbeda, serta paham eksklusifisme yang begitu kuat dibarengi dengan adanya kemutlakan klaim kebenaran yang sepihak dalam, menjadi alasan kuat mengapa konflik Islam mainstream dan JAI tidak berakhir, justru berlarut-larut dan turut terkait dengan berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat.

Konflik Islam mainstream dan JAI di Kuningan sejak tahun 2002 hingga 2010 tercatat menimbulkan berbagai gerakan anarkis, diantaranya ada perusakan masjid dan perumahan milik warga JAI, penutupan dan penyegelan gedung ibadah milik JAI oleh pihak pemerintah, serta terjadinya konflik fisik yang mengarah pada tindakan anarkis oleh kelompok massa yang mengatasnamakan Islam dari berbagai tempat di Jawa Barat. Realitas tersebut menimbulkan adanya perhatian dari berbagai pihak termasuk pemerintah lokal dalam upaya penyelesaian konflik. Salah satu upaya dalam penyelesaian konflik antara Islam mainstream dan JAI di Kuningan terjadi melalui dialog. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota

DPRD setempat, dikatakan bahwa DPRD telah mengambil langkah memfasilitasi dua komunitas (Islam mainstream dan JAI) bertemu dalam ruang dialog. Dalam kesempatan itu kelompok Islam diwakili oleh MUI dan JAI diwakili oleh orang-orang dari pusat (Natzir S.A, dan Rosak (Mubalig JAI). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kuningan melalui DPRD telah melakukan suatu upaya resolusi konflik dengan menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari aparatur Negara dalam menciptakan konteks aman di Kuningan.

Berdasarkan hasil interview dengan pihak MUI dikatakan bahwa upaya DPRD dalam mempertemukan Islam mainstream yang diwakili oleh MUI dan JAI dalam ruang dialog tidak berhasil walaupun telah berlangsung selama lima kali. Kegagalan tersebut menurut MUI disebabkan oleh adanya perbedaan doktrin teologi sehingga sulit mendapat titik temu. Namun walaupun demikian upaya dialog menuju penyelesaian konflik dan kekerasan di kabupaten Kuningan terus diupayakan. Bupati Kuningan dalam menyikapi konflik Islam mainstream dan JAI juga melakukan upaya dialog yang melibatkan para ulama, utusan dari JAI dan KOMNAS HAM. Namun momentum pertemuan melalui dialog tersebut disesali oleh pihak Islam karena agenda dialog tersebut dibahas mengenai pasal 29 UUD 1945, tentang kebebasan beragama. Hal ini dapat dipahami bahwa persoalan kebebasan beragama adalah menjadi perhatian dari KOMNAS HAM karena terkait dengan hak asasi setiap manusia dalam menentukan keyakinan. Oleh sebab itu dengan menjadikan topik kebebasan beragama dalam agenda dialog agar setiap lapisan masyarakat termasuk pemerintah memahami aspek kebebasan beragama dari setiap individu yang telah diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan momentum dialog dengan agenda tentang kebebasan

beragama maka ditemukan bahwa pemerintah kabupaten Kuningan telah melakukan suatu pelanggaran HAM, melalui aksi penyegelan terhadap rumah ibadah JAI. Pada pihak lain, kekesalan kelompok Islam disebabkan karena dalam agenda dialog yang membahas mengenai kebebasan beragama yang berpatokan pada pasal, 29 UUD 1945, pasal 28 UUD 1945, tanpa melihat pada pasal 28 poin J yang membatasinya, sehingga bagi Kelompok Islam, dialog tersebut terkesan terjadi keberpihakan dari KOMNAS HAM yang berpihak kepada JAI dengan alasan minoritas dan Islam sebagai mainstream sebagai mayoritas berada pada posisi salah.

Dinamika keagamaan di Kuningan yang diwarnai dengan konflik Islam mainstream dan JAI, tidak menyulutkan upaya pemerintah kabupaten Kuningan untuk mempertemukan dua komunitas dalam satu ruang bersama, membahas alternatif penyelesaian konflik. Upaya mempertemukan dua komunitas tersebut dilakukan melalui dialog, namun proses dialog tersebut tetap diwarnai dengan adanya keberpihakan pada kelompok tertentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh NU sebagai berikut:

September, 2012, Bupati telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan JAI dengan kelompok Islam, Namun JAI bersih keras tidak ingin berdamai bahkan bersih keras menolak kedatangan Bupati dan rombongan, ketika ingin sholat bersama di masjid JAI dengan imam yang bukan dari JAI. Selanjutnya ditegaskan bahwa keputusan Bupati mengikutsertakan imam dalam proses dialog itu untuk menguji apakah benar JAI itu eksklusif atau tidak.

Terhadap kasus ini dikonfrontir dengan JAI ditemukan bahwa penolakan JAI terhadap imam yang disediakan oleh Bupati untuk memimpin sholat, disebabkan karena hal tersebut

tidak diagendakan, bahkan tidak diinformasikan kepada pihak JAI. Hal ini merupakan sesuatu yang terjadi secara spontanitas dan mengagetkan pihak JAI, dan menunjukkan suatu sikap yang tidak etis dimana keberadaan JAI sebagai suatu komunitas beragama tidak dihargai. Disini terlihat bahwa pemerintah dan kelompok Islam melihat JAI adalah objek bukan sebagai subjek dari dialog tersebut. Pemerintah telah menunjukkan suatu sikap yang tidak netral, karena melihat posisi JAI hanyalah sebagai kelompok minoritas, yang selalu menerima apapun keputusan pemerintah.

Sikap pemerintah yang tidak netral dalam memediasi dialog antara MUI dan JAI memperlihatkan adanya tingkat strukturasi relasi agama dan negara keduanya saling memberi legitimasi. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia, dimana relasi kuasa antara negara dan kelompok agama telah memperlihatkan hubungan simbiotik dalam kerangka pemberian legitimasi. Agama memberikan dukungan untuk proses legitimasi negara (pemerintah), sebaliknya agama telah diberi tempat sekaligus mendapat perlindungan dari negara. Negara dalam menjaga suara elektoral dan kekuasaan akan menggunakan kelompok-kelompok keagamaan yang secara kuantitatif adalah mayoritas demi mengamankan posisi. Oleh sebab itu proses dialog yang difasilitasi oleh pemerintah setempat adalah suatu proses dialog yang berdimensi politik, karena ada unsur keberpihakan pada salah satu kelompok.

Posisi MUI dan JAI dalam Konteks Dialog

Pemerintah yang tidak bersikap netral dan selalu berpihak pada kelompok tertentu, merupakan akar dari ketidakadilan dalam masyarakat. Pada sisi lain akan memproduksi

bentuk-bentuk dominasi dan hegemoni terhadap kelompok lainnya dalam masyarakat. Terkait dengan kasus JAI di Kuningan, pemerintah yang cenderung berpihak kepada ormas Islam yakni MUI, sehingga dampaknya situasi ini lebih menguntungkan MUI. Maupun kelompok yang resisten terhadap JAI. MUI menggunakan ruang dialog sebagai media pembinaan terhadap JAI yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan Hasil Interview dengan MUI kabupaten Kuningan, Juni, 2012, dikatakan bahwa Upaya dialog yang dimediasi oleh pemerintah dipakai oleh MUI untuk melakukan pembinaan kepada JAI, namun hal tersebut tidak berhasil, karena JAI memiliki doktrin dan teologi yang berbeda dengan Disini terlihat bahwa dialog bukan merupakan suatu arena untuk berbagi atau *share* perbedaan yang ada dimana setiap kelompok saling belajar mendalami setiap perbedaan dari masing-masing. Sebaliknya dialog dipahami sebagai media pembinaan. Agenda dialog berupa pembinaan yang terakit dengan unsur-unsur Aqidah (Kitab suci dan kenabian) yang mana MUI menganggap teologi yang dipahami dan diajarkan oleh JAI telah menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Oleh sebab itu JAI harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dalam pandangan MUI JAI telah melakukan suatu kesalahan fatal, sehingga MUI bertanggung jawab melakukan pembinaan dan penyadaran bagi JAI.

Melalui proses dialog dengan cara-cara yang disebutkan di atas, kelihatan adanya dominasi kelompok Islam yang diwakili oleh MUI, menunjukkan supremasi dan arogan, sehingga menghegemoni kelompok JAI. Oleh sebab itu relasi kedua kelompok ini dalam dialog adalah relasi subjek-objek. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar berdialog. Swidler (1990: 42) mengatakan bahwa dialog bukan debat, didalam dialog dibutuhkan sikap menahan emosi, untuk lebih

banyak mendengar, terbuka serta simpati dan berusaha memahami posisi orang lain. Dialog yang tidak dibarengi dengan kesiapan untuk mendengar orang lain, hanya akan menumbuhkan kebencian yang semakin mendalam.

Dalam bukunya *Toward a Universal Theology of Religion*, Swidler menuliskan bahwa tujuan utama dialog adalah untuk saling belajar. Hal ini akan mengubah dan menumbuhkan persepsi dan pemahaman tentang realitas dan bagaimana kita harus berbuat. Dialog antar agama maupun ideologi apapun, harus dilihat dari dua arah yakni sejauh mana masing-masing saling mendalami komunitasnya. Setiap pelaku dialog harus datang berdialog dengan sikap jujur dan sungguh-sungguh. Dalam dialog tidak diperkenankan untuk saling membandingkan gagasan. Namun setiap peserta harus mendefinisikan atau menegaskan doktrin agamanya masing-masing sesuai keyakinan yang dianut, serta tidak memiliki pandangan yang radikal dan cepat menyimpulkan ketidaksetujuan pandangannya terhadap yang lain. Dialog akan berjalan apabila terdapat pandangan yang sejajar serta dilandasi atas kesadaran mengenai kebenaran bersama. Seorang yang masuk dalam dialog paling tidak memiliki sikap kritis terhadap cara pandang dirinya sendiri dan tradisi yang dianut. Pada akhirnya setiap partisipan berusaha masuk ke pengalaman yang dimiliki oleh partnernya dalam dialog agama/ideology dan mencoba mendalaminya (Swidler, 1987).

Swidler mengatakan pula bahwa dialog antar agama bekerja pada tiga area: secara praksis, dimana bekerja sama untuk kemanusiaan, memasuki dimensi spiritual, dimana kita mencoba untuk memahami mitra dialog secara mendalam, dalam pengertian kita mencari kebenaran (swidler, 1988: 24). Dari pendapat swidler, maka dialog yang terjadi berusaha menggerakkan

setiap orang untuk berada dalam kerukunan dan situasi harmoni, bukan sebaliknya dialog menciptakan ruang terjadi dominasi dan hegemoni sehingga ada pihak yang dikorbankan. Dalam proses dialog Islam dan JAI di Kuningan jelas bahwa JAI menjadi korban dari dialog yang didominasi oleh MUI, akibat memandang diri sebagai yang benar, dan melihat JAI sebagai objek yang salah dan harus diselamatkan. Dialog yang dilandasi oleh perbedaan keyakinan atau teologi / ideologi yang ditonjolkan, maka berdampak pada munculnya klaim kebenaran (*truth Claim*) yang sulit untuk dihindari. Hal inilah yang disebut Kinter dengan kategori dialog *replacement*, dimana hanya kebenaran berada pada satu agama atau kelompok (Kinter, 2002: 19).

Dialog adalah arena komunikasi yang mana setiap individu, kelompok maupun masyarakat dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran serta dapat dimengerti dan dihargai oleh pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, Habermas mengatakan bahwa:

"In communicative action speaker and hearer assume their perspectives are interchangeable. By entering into an inter-personal relation in the performative attitude, they commit themselves to recognizing each other symmetrically as responsible subjects capable of orienting their action to validity claims" (Habermas, 1996: 67).

Berdasarkan pendapat Habermas di atas dapat dikatakan bahwa dialog sebagai salah satu bentuk tindakan komunikasi dilakukan atas dasar saling menghargai dan saling mengerti tanpa ada paksaan dan upaya mendominasi satu individu terhadap individu lainnya, satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dalam kasus dialog yang terjadi antara JAI di Manis Lor dan Pemerintah termasuk MUI tidak nampak prinsip-prinsip komunikasi yang

dikemukakan oleh Habermas melalui tindakan komunikasi aktif. Sebaliknya yang muncul adalah orientasi dari kelompok tertentu (pemerintah dan MUI) untuk memenangkan kepentingan mereka. Hal ini yang disebut oleh Habermas sebagai tindakan strategis, dimana kelompok yang berkomunikasi memiliki tujuan untuk memenangkan kepentingan sendiri (Habermas, 1993: 91). Nampak sikap egosentris dan arogansi dari MUI yang merasa lebih benar dan memiliki otoritas penguasa sehingga bisa menekan kelompok JAI yang dianggap salah.

Menurut penilaian MUI, dialog yang sudah berlangsung selama 5 kali yang semuanya difasilitasi pemerintah gagal. Hal ini disebabkan karena JAI memiliki aqidah yang berbeda dengan Islam. Nampak sekali bahwa dialog yang dipahami oleh MUI adalah media pembinaan, dan melihat JAI sebagai kelompok yang salah yang harus diluruskan. MUI tidak menyadari bahwa dengan sikap yang demikian telah terjadi suatu bentuk pemaksaan kehendak atas hak asasi kelompok tertentu terhadap pilihan terkait dengan keyakinan. Demikian juga pemerintah yang bertindak sebagai mediator dalam dialog tersebut ternyata tidak bersikap netral, tetapi justru memihak kepada kelompok Islam yang diwakili oleh MUI. Hasil wawancara dengan pengurus NU kabupaten Kuningan, September, 2012, Sikap ketidaknetralan pemerintah Kabupaten Kuningan nampak ketika ketika memediasi sebuah dialog dengan JAI di Manis Lor ternyata telah mempersiapkan imam untuk memimpin sholat di Masjid an-Nur milik JAI dan hal itu di tolak oleh JAI.

Momentum ini memperlihatkan adanya perebutan kekuasaan siapa yang akan bertindak sebagai imam untuk memimpin sholat berjamaah saat itu. Terlihat betapa besar pengaruh dimensi kekuasaan, politik yang dominan dari pada kesadaran setiap orang memahami

hakekat sholat. Jika kedua komunitas ini memahami bahwa agama, sholat dan ibadah adalah media yang menjembatani relasi manusia dengan Tuhan maka persoalan siapa yang akan menjadi imam itu tidak akan terjadi. Apalagi terjadi sholat yang terpisah antara JAI dan Pemerintah serta kelompok MUI dalam suatu gedung Masjid. Tanpa disadari bahwa perebutan kekuasaan dan sholat dalam gedung yang sama dengan dua imam dan dua kelompok yang berbeda posisi yang masing-masing mengakui dirinya sebagai Islam telah mempermainkan Tuhan bagaikan sebuah sandiwara.

Sikap pemerintah kabupaten Kuningan dengan carater tersebut merupakan strategi untuk membuktikan bahwa apa benar JAI itu eksklusif atau tidak sesuai dengan masukan dari MUI setempat yang mengatakan bahwa JAI itu eksklusif tidak mau sholat bersama dengan Islam lainnya. Penilaian MUI yang mengatakan bahwa JAI itu eksklusif sesuai dengan dasar pijakan mereka yakni keyakinan mereka tentang Islam berdasarkan ajaran alhusunah waljamaah. Alasan teologis yang memunculkan penilaian MUI terhadap JAI menimbulkan adanya sikap permusuhan diantara mereka. Kondisi ini diperkuat lagi oleh sikap pemerintah yang tidak netral dan cenderung berpihak kepada MUI merupakan suatu masalah yang akan berdampak pada muncul persoalan lainnya. Pemerintah sebagai aparatur negara memiliki kewajiban untuk melayani seluruh masyarakat, bersikap netral dalam penyelesaian masalah apapun. Terkait dengan kasus antara JAI dan Islam, pemerintah bertindak sebagai penengah, boleh menjadi mediator mempertemukan kedua pihak dalam dialog, tetapi tidak harus berpihak kepada satu kelompok. Hal ini akan menguntungkan MUI dan merugikan JAI akhirnya MUI bersikap mendominasi dan JAI tersubordinasi, akhirnya dialog dijadikan sebagai media MUI untuk menghakimi JAI.

Analisis Kritis Terhadap Proses Dialog MUI dan JAI

Meminjam pikiran Karl Marx yang mengatakan bahwa agama dinobatkan sebagai *super structure of society*, dapat dilihat dari Posisi MUI yang mewakili kelompok Islam yang dominan sifatnya dalam konteks dialog dengan JAI. Dengan demikian upaya pergeseran nalar kekuatan agama dalam pengertian teologi dogmatis kekekuatan lain "*humanisme*" terasa berat. Hal ini terjadi karena konsekuensi dari aspek humanitas maka terjadi proses mimimalisir aspek kekuatan. Dalam artian bahwa apakah mungkin MUI akan melepaskan sedikit otoritasnya untuk mengakui akan keberadaan JAI? Pada satu sisi hal ini berat karena berdasarkan aspek teologis yang dianut MUI tidak dibenarkan.

Salah satu elemen yang fundamental dari orang beragama adalah aspek teologi, dan setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk berteologi, menentukan pilihan konsep teologi yang tepat bagi setiap individu maupun secara kolektif. Oleh sebab itu apapun produk teologi yang muncul adalah manifestasi dari kebebasan manusia baik individu maupun kelompok berdasarkan haknya dalam mengekspresikan konsep teologi yang absolute bagi dirinya dan komunitasnya. Namun hal ini sangat berbeda jauh dari realita kehidupan beragama, secara khusus agama-agama monoteis, dimana klaim absolute atas konsep kepercayaan yang dibangun secara partikularis dan dipaksakan untuk diterima secara kolektif (Stark, 2001: 171).

Secara khusus wacana ini dihubungkan dengan konsep doktrin agama Abrahamik (*Abrahamic religion*) yang telah memberikan legitimasi atas agama dan teologi sebagai sebuah system yang meliputi aspek ketuhanan, kenabian, dan kitab suci yang absolute. Ketiga aspek ini telah menjadi *truth claim* dalam tatanan system keagamaan.

Konsekuensinya adalah jika muncul sebuah tatanan komunitas keagamaan dengan konsep-konsep teologi yang agak berbeda dengan system tersebut, atau terjadi penambahan terhadap salah satu system tersebut, maka akan menimbulkan konflik hingga aksi kekerasan. Hal ini yang dapat dilihat melalui kasus yang menimpa JAI dan Islam. Konflik JAI dan Islam disebabkan oleh adanya sebuah konstruksi keagamaan yang dimunculkan oleh JAI terkait dengan kenabian dan kitab suci, yang secara otomatis ditolak oleh Islam secara umum.

Terjadi benturan teologi antara Islam dan JAI sebagai representasi dari kekuatan legalitas pewahyuan yang berusaha mempertahankan doktrin teologi yang baku, berhadapan dengan JAI sebagai bagian dari Islam yang berusaha mengkonstruksi paradigma berteologi yang secara substansi tetap mengakui tiga kriteria dasar dari sebuah agama secara khusus Islam, namun terjadi penambahan dalam konsep kenabian. Benturan teologi yang terjadi antara kelompok Islam dan JAI menimbulkan terjadinya konflik dan aksi kekerasan antara kedua komunitas yang sama-sama mengklaim diri sebagai pengikut nabi Muhammad, SAW. Dapat dipahami bahwa, benturan dan konflik antara kedua komunitas ini adalah gejala reflektif yang muncul sebagai reaksi atas aksi yang dianggap menyimpang dari ajaran yang telah menjadi standar normativ yang sudah dibakukan. Oleh sebab itu upaya dialog yang dilakukan dalam mengatasi konflik kedua komunitas ini harus diawali dengan dialog yang bertaraf humanis sebagai moral *force*, tanpa harus tergantung dari kekuatan-kekuatan simbolik seperti pemerintah. Namun dialog itu lahir atas dasar kesadaran, dan kecerdasan setiap kelompok memahami akan hakekat kehadiran agama di muka bumi.

Leonard Swidler dalam tulisannya *Freedom of Religion and*

Dialogue Moving Globalization from Destruction to Construction, memberikan tawaran pentingnya dialog dalam rangka menciptakan perdamaian dan pembebasan di Asia Selatan dan Indonesia (Swidler, 2007:13-33). Dialog sangat penting dengan penekanan pada tiga aspek yakni spiritual untuk saling menolong, aspek kognisi untuk menumbuhkan rasa saling memahami, dan aspek yang ke tiga adalah kebenaran. Ketiga aspek ini dapat menciptakan tumbunya rasa respek, peduli masing-masing peserta dialog, sehingga dapat membangun dialog yang konstruktif di dalam perbedaan. Dialog sebagai suatu tindakan praktik dengan mengedepankan tiga aspek tersebut dapat menciptakan suatu *interreligious understanding* dimana ada sikap respek terhadap keberagaman dan perbedaan dalam suatu masyarakat multikultur (bond, Nathan, 2007:4)

Penerimaan MUI terhadap JAI dalam bentuk kesetaraan sebagai partisipan dalam dialog, sangat memungkinkan terjadinya suasana dialog yang cair, sehingga percakapan-percakapan dialog lebih bernilai humanis, dialogis, dan substansi dari dialog tersebut menjangkau persoalan-persoalan humanitas, sebagai bagian dari penderitaan bersama. Hal ini menunjukkan karakter dari transformasi paradigma menuju teologi humanis, sebagai suatu paradigma baru yang dijadikan sebagai bentuk dekonstruksi dari kerangka keberagaman yang teraktualkan dalam pola-pola hirarki yang akhirnya melemahkan esensi keagamaan dan keberagaman itu sendiri.

Menuju Dialog humanis merupakan bentuk formulasi dialog yang terinspirasi dari pemikiran Knitter, Swidler, Kung, dan lain-lain yang lebih menekankan pada pendekatan humanistic dalam proses dialog. Hal ini akan berkontribusi bagi terciptanya doktrin kebebasan,

penghargaan terhadap hak asasi manusia, menghargai eksistensi berdasarkan martabat kemanusiaan. Hal ini yang menjadi perjuangan semua agama, karena kehadiran agama bukan saja berjuang untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi keberadaannya, tetapi kehadiran agama lebih menunjukkan eksistensi keberadaan melalui hal-hal yang humanis transformatif bagi kesejahteraan bersama.

Agama semakin kaya makna dan semakin menunjukan eksistensi keberadaannya sebagai agen kehidupan, dan bukan sebatas agen politik demi kepentingan segelintir orang demi kekuasaan. Walaupun disadari bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari politik, tetapi politik yang dimaksudkan adalah politik yang bermartabat membangun. Konteks dialog antara MUI dan JAI di Kuningan memperlihatkan bahwa MUI di Kuningan bahwa gerakan modern dalam Islam dengan struktur keagamaan yang skripturalistik, masih menjadi basis teologis. Basis teologis yang dikembangkan oleh MUI di Kuningan belum menjangkau wilayah ideology dan teologi melalui semangat modernisme. Hal ini bisa terlihat dari proses dialog yang cenderung merupakan arena pertarungan klaim kebenaran berbasis doktrin teologis ketimbang membahas persoalan kemanusiaan. Citra agama sebagai agen pembebasan dan membawa orang pada keselamatan menjadi kabur karena munculnya sikap-sikap arogansi yang muncul akibat bertahan pada klaim asas *absolute truth*.

Jika menjadikan al-Qur'an sebagai alasan pembenaran adanya klaim, maka Nabi Muhammad bersabda dalam surah al-Kafirun ayat 6 "bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ciri pluralitas yang muncul ditekankan oleh Nabi Muhammad saw adalah bentuk penghargaan atas realitas pluralisme.

Walapun secara historis surat ini muncul dalam konteks perdebatan antara Abrahamic Religion, dan tidak menyinggung secara eksplicit tentang bagaimana pluralitas dalam Islam, namun spirit dari ayat ini menegaskan bahwa Islam sebenarnya terbuka dan pluralis. Spirit ini yang seyogyanya dipedomani oleh MUI di Kuningan, sehingga dalam proses dialog tidak terjadi memaksakan kebenaran secara Islam yang diyakini oleh MUI dan dipaksakan kebenaran tersebut kepada JAI. Karena pada prinsipnya setiap orang punya pengalaman iman yang berbeda yang mengantarkannya untuk dapat menkonstruksi iman dan keyakinannya. Hal ini disebabkan karena iman seseorang bukan hanya lahir dari realitas kitab suci yang dipelajari, tetapi iman seseorang dikonstruksi berdasarkan kombinasi dari realitas kitab suci dan realita pengalaman pribadi yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Dialog antar agama merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan suatu kesadaran bersama akan fakta keberagaman yang ada. Selain itu untuk meminimalisir tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Upaya dialog antar agama yang diprakarsai oleh setiap elit agama merupakan suatu rutinitas dari waktu kewaktu dan mudah untuk dilakukan. Bahkan dari dialog tersebut dapat menciptakan suatu ruang yang kondusif atas dasar toleransi setiap pemeluk agama. Seperti pengakuan ketua MUI maupun NU di Kuningan bahwa Islam bisa bersahabat dan berdamai dengan semua agama, dengan Kristen, Budha dan lain-lain. Ucapan-ucapan ini mau menegaskan

- bahwa Islam itu agama yang terbuka dan pluralis.
2. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa MUI maupun NU bisa berdialog secara terbuka dengan berbagai agama yang ada di Kuningan, namun tidak terjadi dengan komunitas JAI. Dialog antar agama boleh berjalan secara baik di Kuningan, namun dialog intra agama seperti yang terjadi antara MUI dan JAI tidak berhasil dilakukan. Kegagalan proses dialog antara MUI dan JAI disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Alasan perbedaan teologis antara MUI dan JAI terkait dengan konsep kenabian dan kitab suci. Akibat dari adanya perbedaan teologi tersebut MUI memandang JAI sebagai kelompok yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Oleh sebab itu dialog dilakukan bukan sebagai suatu arena belajar, sharing, tetapi dialog dijadikan ajang pembinaan, kepada JAI. Secara tegas dapat dikatakan bahwa dialog antara MUI dan JAI adalah dialog yang represif. Unsur represifitas nampak dalam bentuk pengajaran, ajakan untuk bertobat, bahkan secara aksi terjadi pemaksaan dalam proses dialog tersebut agar JAI harus menerima Imam yang disiapkan oleh Bupati untuk memimpin shalat berjamaah.
 3. Pemerintah sebagai mediator dalam dialog tidak bersikap netral, tetapi memihak kepada kelompok MUI. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dialog ternyata tidak bebas dari pengaruh politik dalam menjaga suara electoral, mencari dukungan masa, bahkan bisa dibilang juga sebagai wujud dari janji-janji politik yang dikampanyekan saat menyongsong pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Atas dasar itulah maka pemerintah juga turut mengklaim bahwa JAI adalah kelompok dalam agama Islam yang telah menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Sikap ketidaknetralan ini pun dapat terlihat dari proses dialog di lingkungan masjid JAI yang dihadiri oleh pihak pemerintah Kuningan, dengan utusan dari MUI yang akhir dari dialog tersebut dilakukan shalat berjamaah dengan imam yang telah disediakan oleh pemerintah tanpa sepengetahuan JAI. Terjadi perebutan kekuasaan siapa yang akan bertindak sebagai imam yang pada akhirnya terjadi shalat dua kelompok dengan dua imam dalam satu masjid. Boleh dikatakan bahwa agama dengan ritual yang mengandung unsur kesakralan, menjembatani relasi manusia dengan Tuhan dijadikan arena perebutan kekuasaan, akhirnya Tuhan seakan-akan dipermainkan dan diperebutkan.

Daftar Pustaka

- Burhanudin Daya, 2004, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama, Mataram-Minang Lintas Budaya*, Yogyakarta.
- Habermas. Jurgen, 1993, *Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics*, Trans. Kieran P. Cronin, Cambridge, Mass: MIT Press.
- _____, *The Theory of Communicative Action*, McCharty, Boston, Beacon Press,

- Knitter Paul F, 1995, *One Earth Many Religion: Multifaith Dialogue and Global Responsibility*, Maryknoll, New York.
- K.S. Nathan, 2007, *Religious, Pluralismin Democratic Society*, Konrad Adenauer Stiftung MASS.
- _____, 2002, *Introducing Theologies of Religion*, Marryknoll, New York.
- Panikkar Raimundo, 1999, *Interreligious Dialogue*, New York, Paulist Press.
- Kung Hans, *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*, New York, Crosroad.
- Samartha. Stanley. J, 1989, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, Kanisisus, Yogyakarta.
- Stark Rodney, 2001, *One True God, Historical Consequences of Monotheism*, Princenton University Press.
- Swidler Leonard, 1990, *After the Absolute: the Dialogical Future of Religous Reflection*. Mineapolis: Ausburgh-Fortress Press.
- _____, 1987, *Toward a Universal Theology of Religion*, Orbis Books-Marryknoll, New York.
- _____, 1988, *Theoria Praxis: How Jews, Christian and Muslim Can Together Move From Theory to Practice*, Leuven, Belium, Uitgeverij Peeters.
- _____, 2007, *Fredoom of Religion and Dialogue Moving Globalization From Destruction to Construction*, Korand Adenauer Stiftung MAAS.